

BAB I

PENDAHULUAN

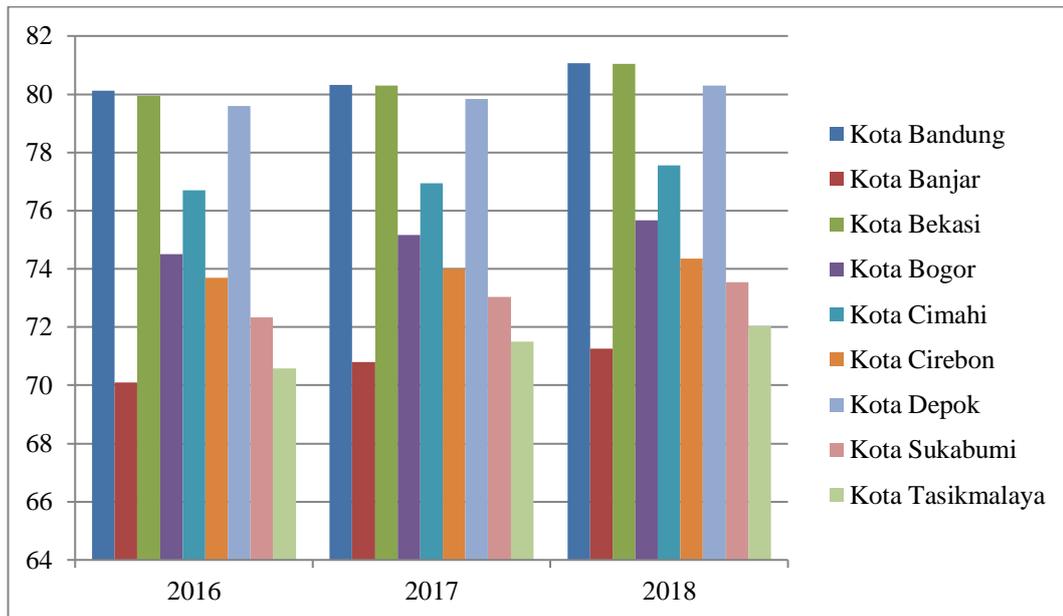
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan ini seringkali dilihat dari pencapaian kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dipengaruhi oleh indikator kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH), Indikator Pendidikan yang diwakili oleh Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indikator Ekonomi yang diwakili oleh Daya Beli masyarakat (PPP).

Suatu negara dikatakan maju dapat tercermin jika yang dijadikan acuan salah satunya adalah masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang tentu saja menjelaskan seberapa besar perkembangan manusia disuatu negara. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang bisa dieksplorasi dan digali sehingga menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia yang signifikan. Pembangunan manusia (*human development*) merupakan suatu alat yang menempatkan manusia sebagai titik pusat sehingga setiap upaya pembangunan mempunyai ciri dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan

partisipasi penduduk dalam semua proses pembangunan. Tujuan dari pembangunan Indonesia yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya, yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945 “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Bank Dunia menyatakan bahwa tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Perbaikan kualitas hidup memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi, tetapi terdapat hal lain yang harus diperjuangkan, antara lain pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual dan pelestarian ragam kehidupan budaya (*World Development Report* 1991).

Desentralisasi Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu melakukan penataan yang dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Jawa Barat agar semakin sejahtera sehat, baik jasmani maupun rohani yang merupakan pertanggungjawaban publik bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Salah satu unsur dalam pembangunan manusia adalah lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat. Berikut adalah persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Perkotaan Provinsi Jawa Barat yang terjadi selama tahun 2016 sampai tahun 2018.



Gambar 1.1 Persentase tingkat IPM di Perkotaan Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018
 Sumber: metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat-2010-2018.html. Badan Pusat Statistik

Secara umum, kualitas indeks pembangunan manusia yang tertinggi dicapai oleh Kota Bandung dan diikuti oleh Kota Bekasi dan Depok, sebaliknya pencapaian pembangunan manusia di Kota Banjar selalu berada di peringkat terakhir. Pencapaian IPM di seluruh di Kota Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2018 termasuk dalam kategori “menengah sedang” atau memiliki nilai IPM antara 66-80.

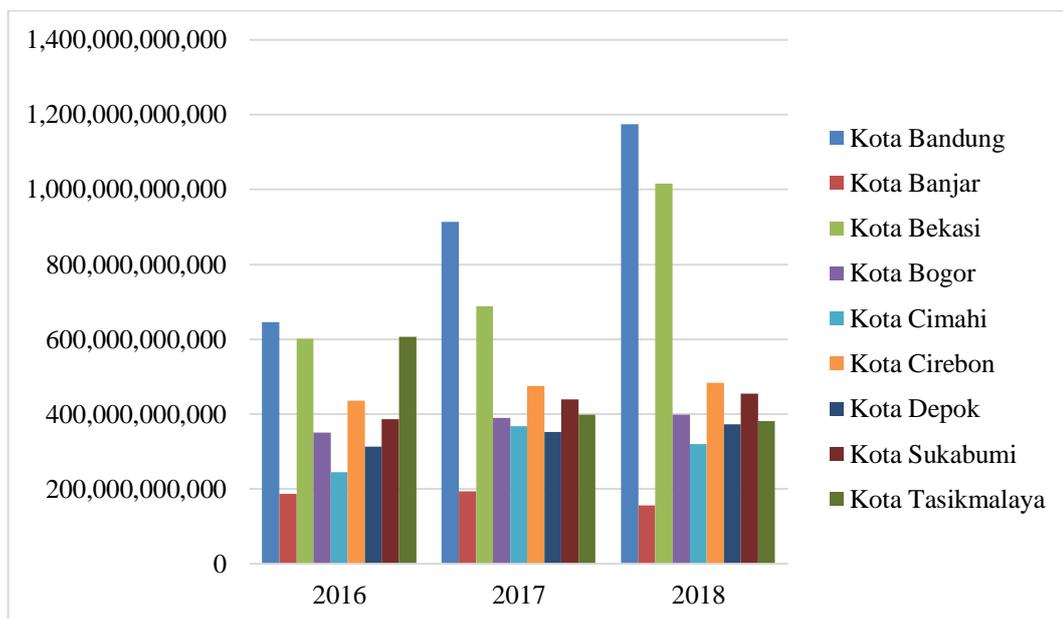
Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat IPM di Perkotaan Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada Kota Bandung yang merupakan Kota tertinggi tingkat IPM nya pada tahun 2016 yaitu 80,13% dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan hingga pada tahun 2018 menjadi 81,06%. Dan Kota terendah di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat IPM pada tahun 2016 sebesar 70,09% hingga pada tahun 2018 sebesar 71,25% yaitu Kota Banjar. Gambaran perbandingan pencapaian IPM di Kota Bandung dan Kota

Banjar menjadi sebuah perbandingan yang kontras. Fenomena ini secara tidak langsung menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup lebar dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial antar wilayah di Perkotaan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian perlu dipikirkan upaya-upaya yang lebih intensif untuk mengurangi kesenjangan ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui pengembangan infrastruktur dan ekonomi yang berbasis lokal.

Betapa pentingnya pembangunan manusia, dimana dalam pembangunan manusia tersebut tidak hanya meliputi dimensi kesejahteraan saja melainkan terkait juga dengan meningkatkan kapasitas dasar manusia melalui akses terhadap pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin. Adalah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang publik.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Pengeluaran pemerintah (*governmen expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno,2002) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang terdapat dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat memperluas pilihan manusia. Jadi semakin besar Belanja Daerah akan memberi peluang yang lebih luas untuk meningkatkan IPM.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Menurut Meier dan Rauch (dalam Brata, 2002) pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Berikut adalah jumlah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Perkotaan Jawa Barat yang terjadi selama tahun 2014 samapai tahun 2018.

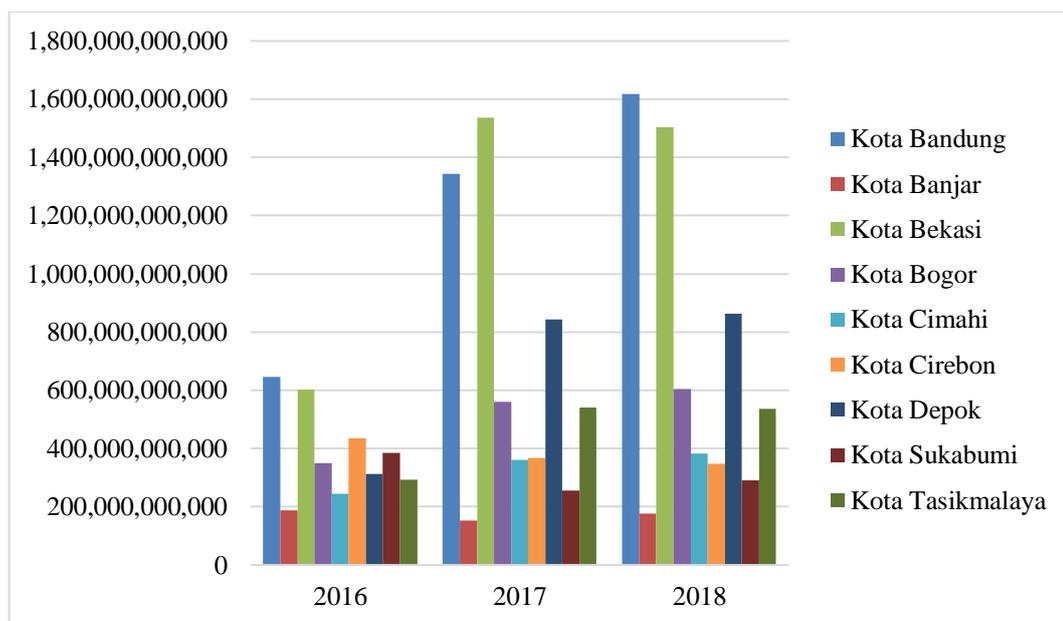


Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Pendidikan (rupiah) periode 2016-2018
 Sumber: realisasi-anggaran. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI.

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan pada setiap Kota mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahun tertentu. Kenaikan pengeluaran pemerintah tertinggi berada di Kota

Bandung pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 646.120.320.923,-. Kemudian pada tahun 2018 pengeluaran pemerintah tertinggi berada di Kota Bandung sebesar Rp. 1.175.434.193.856,- dan terendah berada di Kota Banjar sebesar Rp. 156.699.517.057,-.

Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak (Septiana, Dkk. 2015). Berikut adalah jumlah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Perkotaan Jawa Barat yang terjadi selama tahun 2016 sampai tahun 2018.



Gambar 1.3 Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Kesehatan (rupiah) periode 2016-2018
Sumber: realisasi-anggaran. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI.

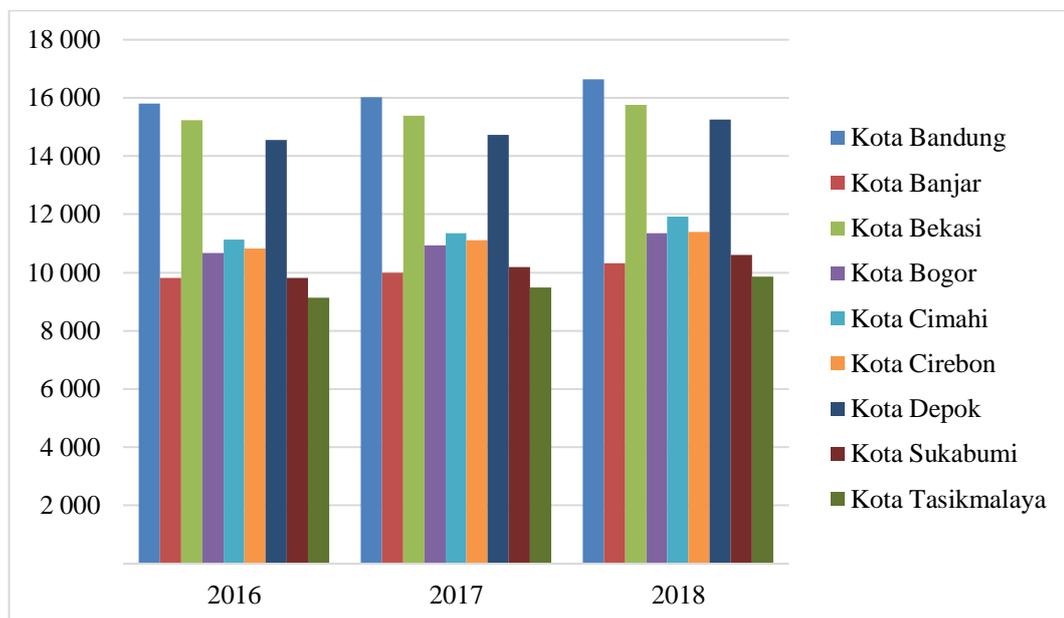
Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan di Perkotaan Provinsi Jawa Barat dalam periode 2016-2018 dari tahun ke tahun hampir setiap Kota mengalami peningkatan, contohnya Kota Bandung yang setiap tahun mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 646.120.320.923,- hingga pada tahun

2018 sebesar Rp. 1.617.464.116.037,-. Pada tahun 2018 pengeluaran pemerintah terendah berada di Kota Banjar sebesar Rp. 177.062.663.613,-.

Kemampuan dan kekuatan pemerintah tergantung pada pengaturan kelembagaan, hukum, peraturan, kondisi politik dan keadaan eksternal. Proses politik memainkan peran utama dalam penyusunan perencanaan terkait dengan masalah peningkatan IPM. Karena itulah pemerintah juga berperan sebagai penambah nilai permintaan sumber daya.

Salah satu usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana dalam anggaran belanja daerah, dimana terdapat beberapa sektor diantaranya anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Besarnya anggaran pada setiap sektor bervariasi, kenaikan anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan yang terpenting adalah menciptakan kualitas sumber daya manusia agar tujuan tersebut dapat tercapai diantaranya melalui anggaran APBD anggaran pendidikan dan APBD anggaran kesehatan. Oleh karena itu dalam melihat tingkat Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah kita harus melihat alokasi pengeluaran daerahnya, apakah pengeluaran daerah tersebut efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan sangat erat kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia, semakin tinggi angka murid yang melanjutkan ke perguruan tinggi semakin besar peluang untuk memperoleh lapangan pekerjaan dan mempunyai keahlian sehingga berkurangnya angka pengangguran dan meningkatkan produktifitas serta mensejahterakan masyarakat.

Selain dari anggaran, salah satu indikator membaiknya pembangunan manusia adalah meningkatnya standar hidup layak yang direpresentasikan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi IPM yakni pengeluaran per kapita. Berikut adalah jumlah pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat yang terjadi selamata tahun 2016 sampai tahun 2018.



Gambar 1.4 Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah) periode 2016-2018

Sumber: metode-baru-pengeluaran-per-kapita-disesuaikan-000-rp-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat-2010-2018.html. Badan Pusat Statistik

Tidak semua orang memiliki pengeluaran yang sama. Dari gambar 1.4 dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita setiap Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti pada tahun 2016 pengeluaran per kapita tertinggi berada di Kota Bandung dengan pengeluaran sebesar Rp. 15.805.000,- dan hingga pada tahun 2018 sebesar Rp. 16.630.000,-. Sedangkan pengeluaran per kapita terendah pada tahun 2016 berada di Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 9.145.000,- hingga pada tahun 2018 sebesar Rp. 9.855.000,-.

Apabila jumlah pengeluaran per kapita penduduk di suatu daerah tinggi maka akan menurunkan IPM. Hal ini terjadi karena penduduk yang pengeluaran per kapitanya tinggi maka hasil dari pendapatan per kapitanya akan berkurang, atau apabila pengeluaran per kapita lebih besar dari pendapata per kapita maka akan mengalami keterbatasan dalam mengakses kebutuhan mereka termasuk dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu akan menurunkan IPM. Dengan membandingkan nilai IPM Kota se Jawa Barat, kita dapat melihat perbandingan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) serta melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Dengan melihat kenyataan angka IPM di Perkotaan Provinsi Jawa Barat maka peran dan tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah menjadi semakin penting karena dituntut harus mampu untuk melakukan fungsi alokasin atas semua sumber daya dan dana yang dimiliki daerah untuk meningkatkan seluruh kebutuhan pelayanan publik sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakat, tentunya dalam hal ini yang menjadi prioritas adalah pelayanan publik menyangkut sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang menjadi inti dari konsep pembangunan manusia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk menganalisis masalah dengan judul **“ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PERKOTAAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014-2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas muncul pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Kesehatan dan Pengeluaran Perkapita terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Kesehatan dan Pengeluaran Perkapita terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama?
3. Bagaimana komparasi Indeks Pembangunan Manusia dan faktor yang mempengaruhinya di Perkotaan Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Kesehatan dan Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara parsial.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor

Kesehatan dan Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama.

3. Untuk mengetahui komparasi Indeks Pembangunan Manusia dan faktor yang mempengaruhinya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh pemahaman dan menambah wawasan mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Bidang Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi bagi lingkungan akademik khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan informasi dan bahan kajian tentang gambaran/informasi tentang Indeks Pembangunan Manusia yang terjadi selama periode 2014-2018 di Perkotaan Provinsi Jawa Barat.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan IPM di Perkotaan Provinsi Jawa Barat.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan bacaan, referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang terkait pada penelitian tentang IPM di Perkotaan Provinsi Jawa Barat.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Perkotaan Jawa Barat, pengambilan data penelitian ini adalah disitus resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini ditargetkan selesai selama enam bulan yang dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai bulan Januari 2020.

Adapun rincian kegiatan penelitian ini ditampilkan pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

Keterangan	Tahun 2019																			
	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Pengajuan Judul	■	■	■	■																
Pengumpulan Data		■	■	■																
Penyusunan UP dan Bimbingan Penelitian		■	■	■	■	■	■	■												
Seminar Usulan Penelitian										■										

